



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I  
2018

**Penyusun:**

Penanggung Jawab: Rinardi | Ketua Tim: Abdullah |  
Editor: Wawan Setiawan | Desain Grafis: Al Udin |  
Anggota: Andi Hendrawan | Tengku Yustisia | Yunisah | Jumadi I

**KANWIL DJEN**  
**PERBENDAHARAAN**  
*Provinsi Bengkulu*

## DAFTAR ISI

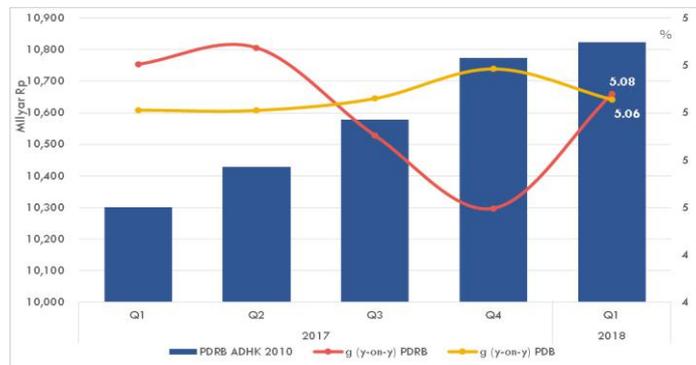
I.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL.....	1
	A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
	B. Inflasi.....	2
	C. Indikator Kesejahteraan.....	3
II.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN.....	5
	A. Pendapatan Negara.....	6
	B. Belanja Negara.....	11
	C. Prognosis Realisasi APBN.....	14
III.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD.....	15
	A. Pendapatan Daerah.....	16
	B. Belanja Daerah.....	19
	C. Prognosis Realisasi APBD.....	19
IV.	PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD).....	20
	A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....	20
	B. Pendapatan Konsolidasian.....	20
	C. Belanja Konsolidasian.....	21
	D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	22
V.	BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	23
	Pembangunan Ekonomi Kemaritiman Bengkulu.....	23

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

### A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai Rp16,01 triliun sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp10,82 triliun. Angka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 0,45 persen (*q-to-q*) dibandingkan Triwulan IV Tahun 2017 dan tumbuh sebesar 5,08 persen (*y-on-y*) namun sedikit mengalami perlambatan (0,17 persen) dibandingkan dengan periode Triwulan I Tahun 2017. Secara nasional, pertumbuhan Provinsi Bengkulu tercatat lebih tinggi dari angka nasional (5,06 persen) namun berada di atas laju rata-rata pertumbuhan regional Sumatera (4,34 persen). Angka pertumbuhan tersebut berada pada peringkat ketiga di bawah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Grafik I.1 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi (g) Bengkulu



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

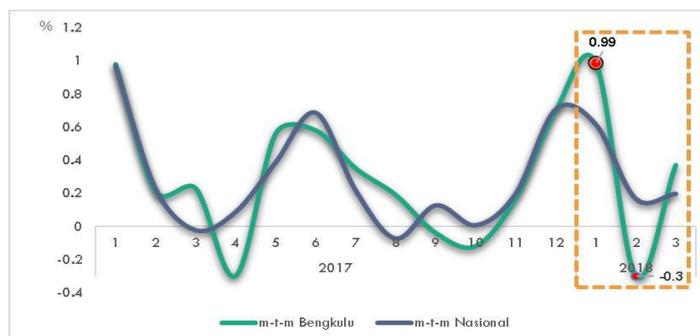
Struktur perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2018 dilihat dari segi lapangan usaha, masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yang sama dengan periode sebelumnya yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan (28,82 persen), perdagangan besar dan eceran (14,58 persen), serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,95 persen). Berdasarkan perkembangan triwulanan, seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan kecuali lapangan usaha konstruksi. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu jasa lainnya (2,29 persen); diikuti pengadaan listrik dan gas (2,17 persen) dan jasa keuangan (1,99 persen). Sementara kontraksi pertumbuhan terjadi pada lapangan usaha konstruksi (-0,36 persen).

Sedangkan struktur perekonomian Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2018 dilihat dari segi pengeluaran menunjukkan hampir semua komponen tumbuh positif. Perekonomian ditopang oleh konsumsi rumah tangga (63,84 persen) diikuti oleh komponen impor (58,84 persen) dan komponen PMTB (38,68 persen). Tercatat pengeluaran konsumsi lembaga nonproft yang melayani rumah tangga (LNPR) merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi (8,70 persen) seiring dengan pengeluaran kegiatan berkaitan dengan Pilkada dan persiapan Pemilu 2019. Sedangkan pertumbuhan ekonomi *q-t-q* berlawanan dengan pertumbuhan *y-o-y* dimana seluruh komponen mengalami kontraksi (kecuali komponen pengeluaran konsumsi LNPR yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,31 persen dan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1,28 persen). Kontraksi tertinggi pada komponen konsumsi pemerintah sebesar -16,23 persen yang disebabkan penurunan realisasi APBN dan APBD Prov/Kab/Kota yang baru berkisar 8-12 persen.

## B. Inflasi

Perkembangan harga barang dan jasa secara umum untuk Provinsi Bengkulu yang diwakili oleh Kota Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercatat mengalami peningkatan (inflasi tahun kalender (y-t-d) sebesar 1,06 persen). Angka ini sedikit berada di atas inflasi nasional yaitu 0,99 persen.

**Grafik I.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu dan Nasional (m-t-m)**



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Kenaikan harga secara umum pada bulan Januari 2018 tercatat sebesar 0,99 persen (berada di atas inflasi nasional yaitu 0,62 persen). Angka inflasi ini disebabkan naiknya harga pada kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 3,27 persen terutama dipicu oleh perubahan harga beras, daging ayam ras, dan cabai merah. Selain itu, inflasi bulan Januari 2018 disebabkan kenaikan kelompok pengeluaran harga makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,66 persen. Kelompok pengeluaran ini menyumbang inflasi sebesar 0,11 persen. Selain terjadi inflasi, pada kelompok pengeluaran kesehatan serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,07 persen dan -0,11 persen.

Perkembangan harga pada bulan Februari 2018 tercatat mengalami deflasi sebesar sebesar -0,30 persen (sedangkan secara nasional tercatat inflasi sebesar 0,17 persen). Angka deflasi ini disebabkan penurunan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -1,04 persen dan kelompok bahan makanan sebesar -0,62 persen. Komoditas yang mengalami deflasi antara lain turunnya tarif angkutan udara, harga daging ayam ras, telur ayam ras.

Sedangkan pada bulan Maret 2018 tercatat terjadi inflasi sebesar 0,37 persen (secara nasional tercatat inflasi sebesar 0,20 persen). Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,03 persen dan kelompok bahan makanan sebesar 0,45 persen. Komoditas yang mengalami inflasi antara lain naiknya tarif angkutan udara, harga cabai merah, shampoo.

Sedangkan fluktuasi harga selama Triwulan I Tahun 2018 terlihat pada perkembangan harga dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Rata-rata inflasi *year on year* pada periode ini sedikit lebih rendah dari angka inflasi nasional. Angka inflasi yang terkendali tersebut merupakan kinerja dari seluruh *stakeholder* di bawah koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu. Upaya TPID selama tahun 2017 memberikan dampak positif pada perkembangan inflasi ini. Secara riil, TPID upaya tersebut diwujudkan dalam kebijakan antara lain<sup>1</sup>:

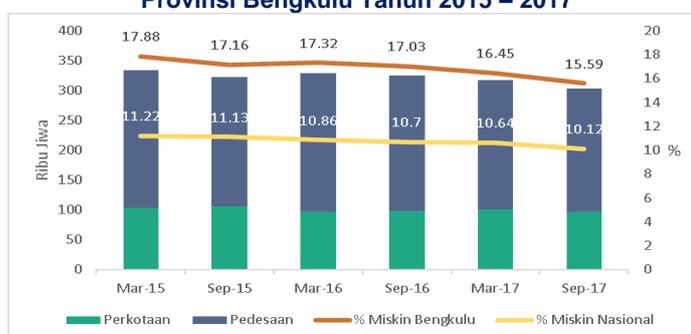
<sup>1</sup> Kajian Ekonomi & Keuangan Regional Provinsi Bengkulu Edisi Februari 2018

1. Implementasi kerjasama benih ikan unggul dengan BPBAT Sungai Gelam
  2. Operasi pasar murah di 10+60 titik di Kota Bengkulu
  3. Pembukaan 3 (tiga) rute penerbangan baru
  4. Implementasi impor sapi jantan dari NTT
  5. Kebijakan BBM satu harga Enggano
  6. Pembangunan 16 Toko Tani Indonesia
  7. Pembangunan 395 Rumah Pangan Kita
- Dari rangkaian kegiatan dimaksud, angka inflasi berada pada level terjaga sesuai target inflasi nasional tahun 2018 yaitu sebesar  $3,5\% \pm 1\%$ .

### C. Indikator Kesejahteraan

Perkembangan persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya tren penurunan. Posisi per September 2017 angka kemiskinan sebesar 15,59 persen (302,63 ribu jiwa) atau berkurang 1,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016.

**Grafik 1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bengkulu Tahun 2015 – 2017**



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Konsentrasi penduduk miskin masih didominasi penduduk di pedesaan. Sejumlah 205,48 ribu jiwa atau 67,90 persen dari total penduduk miskin berada di pedesaan. Lebih lanjut berdasarkan perkembangan garis kemiskinan (kenaikan garis kemiskinan sebesar 5,85 persen menunjukkan bahwa komoditi makanan masih berperan lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan. Komoditi makanan yang memberikan dampak terhadap kemiskinan diantaranya beras, rokok kretek filter dan daging sapi.

Penurunan persentase penduduk miskin dimaksud perlu dicermati. Secara nasional angka persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu masih berada di atas persentase nasional. Selanjutnya berdasarkan indeks kemiskinan (P1 dan P2), penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dari 2,79 pada September 2016 menjadi 2,76 di posisi September 2017 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangkan peningkatan indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,64 pada September 2016 menjadi 0,71 di posisi September 2017 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar.

Disisi lain, indikator kesejahteraan dapat dilihat dari aspek ketenagakerjaan. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Februari 2018 dibandingkan dengan Februari 2017 menunjukkan bahwa terjadi penurunan pengangguran (-3,71 persen) dan jumlah angkatan kerja (-0,02 persen). Disisi lain terdapat peningkatan jumlah penduduk bekerja sebesar 0,09 persen. Perbandingan statistik ketenagakerjaan dua tahun terakhir adalah sebagai berikut:

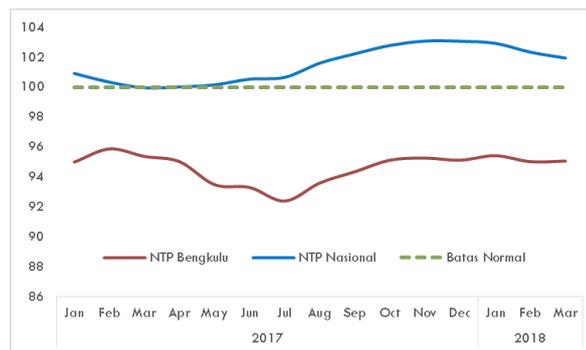
**Tabel I.1 Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu**

Jenis Kegiatan Utama	Februari 2017	Februari 2018
• Angkatan Kerja	1.033.581	1.033.401
Bekerja	1.004.559	1.005.457
Penganggur	29.022	27.944
• Tingkat Parsitipasi Angkatan Kerja	74,59%	73,12%
• Tingkat Pengangguran Terbuka	2,81%	2,70%

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Keadaan ketenagakerjaan yang tercermin dari komposisi sektoral, status pekerjaan utama dan latar belakang pendidikan menunjukkan keadaan yang kurang menggembirakan. Perekonomian di Provinsi Bengkulu masih ditopang dari sektor pertanian dimana tenaga kerja yang terserap dari sektor ini mencapai 51,81 persen. Selanjutnya perekonomian ditopang oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan yang masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 13,09 persen dan 6,11 persen.

**Grafik 1. 4 Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – 2018**



Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu

Perkembangan kondisi ketenagakerjaan khususnya pada sektor pertanian menunjukkan bahwa petani mengalami defisit. Hal ini dikarenakan kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Dengan kata lain, pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Berdasarkan angka statistik, defisit petani tersebut terlihat dari besaran Nilai Tukar Petani yang berada di bawah batas normal (100). Selama Triwulan I Tahun 2018, rata-rata NTP berada pada level 95,17 dan tertinggi pada Bulan Januari yaitu 95,42.

Komposisi ketenagakerjaan dapat ditinjau dari status pekerjaan utama dan latar belakang pendidikan. Persentase penduduk yang bekerja atau melakukan kegiatan secara informal lebih dominan dibandingkan secara formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 71,62 persen dan angka ini meningkat sebesar 5,23 persen dari angka bulan Agustus 2017. Statistik juga mencatatkan bahwa penyerapan tenaga kerja sebesar 1.005.457 orang masih didominasi penduduk dengan latar belakang pendidikan rendah dengan komposisi tamat SD (43,45 persen) dan SMP (19,25 persen). Selain itu, sebesar 11,85 persen tamatan Diploma I/II/III berada pada posisi menganggur.

## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tema kebijakan fiskal tahun 2018, yaitu “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”, artinya APBN Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja. Kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2018 diharapkan mampu menjadi alat percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien, dengan berfokus pada penganggaran belanja yang makin produktif sesuai prioritas nasional. Tiga strategi fiskal yang ditempuh yaitu optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi; efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas; serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Alokasi belanja negara pada APBN di wilayah Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 adalah sebesar Rp14,05 triliun, sedangkan target pendapatan negara adalah sebesar Rp2,60 triliun. Rincian selengkapnya pada tabel II.1 di bawah ini:

**Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>2.265,73</b>	<b>336,71</b>	<b>2.605,85</b>	<b>367,69</b>
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.265,73	336,71	2.605,85	367,69
1. Penerimaan Pajak	2.030,00	314,58	2.030,00	321,11
2. PNBP	235,73	22,13	575,85	46,58
II. HIBAH	-	-	-	-
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>14.783,24</b>	<b>3.566,22</b>	<b>14.056,08</b>	<b>2.986,32</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	4.407,11	1.369,74	4.490,26	813,45
1. Belanja Pegawai	1.441,84	288,89	1.530,22	426,25
2. Belanja Barang	1.450,77	134,78	1.824,43	284,32
3. Belanja Modal	1.501,03	134,72	1.121,42	102,88
4. Belanja Bantuan Sosial	13,47	0,02	14,19	0
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	10.376,13	2.196,48	9.565,82	2.172,87
1. Transfer ke Daerah	9.340,79	2.196,48	8.619,43	2.037,16
a. Dana Perimbangan	9.243,77	2.165,65	8.583,43	2.037,16
1) Dana Alokasi Umum	6.412,86	1.880,83	6.412,41	1.791,26
2) Dana Bagi Hasil	336,39	80,44	292,87	41,45
3) Dana Alokasi Khusus	2.333,12	204,38	1.878,15	204,45
b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
d. Dana Transfer Lainnya	97,02	30,83	36,00	-
2. Dana Desa	1.035,34	-	946,39	135,71
<b>C. SURPLUS DEFISIT</b>	<b>(12.517,51)</b>	<b>(2.892,80)</b>	<b>(11.450,23)</b>	<b>(2.618,63)</b>

Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, Pemerintah berupaya membuat kebijakan dalam mengoptimalkan Pendapatan Negara. Upaya optimalisasi Pendapatan Negara mulai terwujud, pada Penerimaan Dalam Negeri adalah sebesar Rp367,69 miliar atau meningkat sekitar Rp30,98 miliar dibanding Triwulan I Tahun 2017 yaitu Rp336,71 miliar. Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Sedangkan upaya pengelolaan Belanja Negara secara produktif dan berkualitas serta pengelolaan pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian (prudent), tercermin dari Pemerintah Pusat mengalokasikan Belanja Modal (terutama anggaran infrastruktur dan kesehatan) dan Belanja Barang lebih besar dari jenis belanja lainnya.

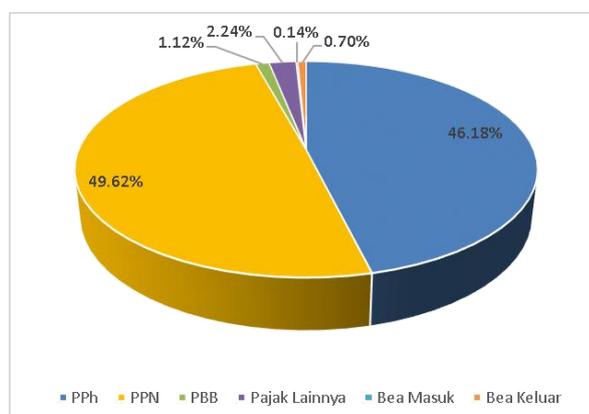
Dari tabel II.1 di atas dapat dilihat bahwa dari sisi Pendapatan Negara, sebagian besar (87,33 persen) masih berasal dari penerimaan perpajakan Rp321,11 miliar. Adapun porsi PNBP (termasuk pendapatan BLU) adalah sebesar Rp46,58 miliar atau 12,66 persen. Oleh karena itu memang sangat diperlukan upaya intensifikasi pungutan PNBP, maupun ekstensifikasi potensi jenis-jenis PNBP baru. Sedangkan dari sisi Belanja Negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2018 mencapai Rp813,45 miliar atau mencapai tingkat realisasi anggaran 18,11 persen. Tingkat realisasi anggaran Belanja Barang mencapai 15,58 persen, sedangkan Belanja Modal baru mencapai 9,17 persen. Belanja Pegawai mencapai tingkat realisasi tertinggi yaitu 27,85 persen, karena sifat pengeluarannya rutin setiap bulan.

## A. Pendapatan Negara

### 1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan di Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp321,11 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode sampai dengan Triwulan I tahun 2017, dimana realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp314,58 triliun (di luar tax amnesty), maka terdapat peningkatan sekitar Rp6,53 miliar. Penerimaan PPh dan penerimaan PPN masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan perpajakan, 95,80 persen dari seluruh penerimaan perpajakan merupakan penerimaan PPh dan PPN. Berikut Komposisi Penerimaan Perpajakan di wilayah Bengkulu sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2018:

**Grafik II.1 Komposisi Penerimaan Perpajakan di Wilayah Bengkulu sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2018**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

a) Pajak Penghasilan (PPH)

Dari Grafik II.2 terlihat bahwa, realisasi penerimaan PPh secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2018 mengalami peningkatan 2,29 persen atau sebesar 3,32 miliar, apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2017. Faktor peningkatan realisasi PPh adalah jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar mengalami tingkat kepatuhan yang meningkat yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, meningkatnya kegiatan usaha pada sektor pertanian, perdagangan, hotel dan restoran pada Triwulan I Tahun 2018. Perbandingan Realisasi Penerimaan PPh Tahun 2017 dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Grafik II.2 Perbandingan Penerimaan PPh Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**

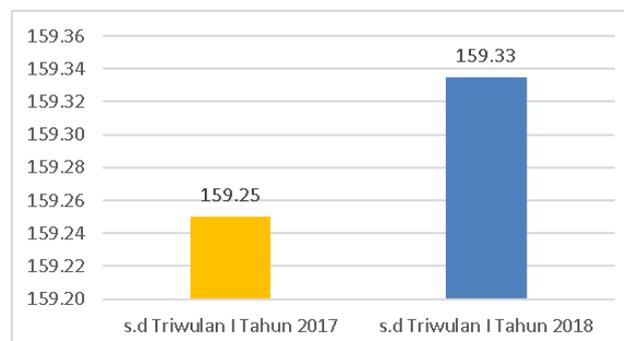


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Seperti tahun sebelumnya, selain penerimaan PPh, penerimaan PPN masih mendominasi dalam kontribusi terhadap penerimaan negara. Realisasi penerimaan PPN secara kumulatif sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2018 hanya mengalami sedikit peningkatan dibanding realisasi penerimaan PPN pada Triwulan I Tahun 2017, yaitu meningkat sekitar Rp 80 juta atau 0,05 persen. Perbandingan Realisasi Penerimaan PPN Tahun 2017 dengan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Grafik II.3 Perbandingan Penerimaan PPN Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**

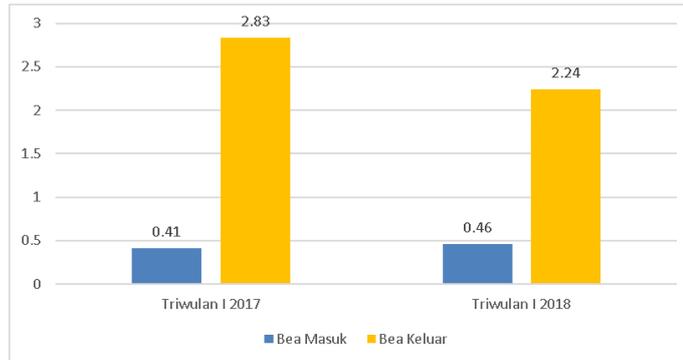


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

c) Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari pendapatan Bea Masuk dan Bea Keluar serta Cukai. Namun sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2018, belum ada realisasi penerimaan Cukai di wilayah Provinsi Bengkulu.

**Grafik II.4 Perbandingan Penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



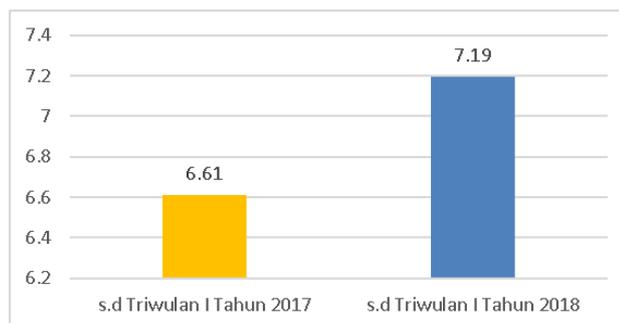
Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Penerimaan Bea Masuk pada Triwulan I Tahun 2017 dan Triwulan I Tahun 2018 masih belum memberikan kontribusi yang signifikan. Sampai akhir Triwulan I Tahun 2018 penerimaan Bea Masuk hanya memberikan kontribusi sebesar 0,14 persen dari seluruh penerimaan pajak. Penerimaan Bea Masuk sampai akhir Triwulan I Tahun 2018 mencapai Rp460 juta, sedikit meningkat dari Triwulan I tahun sebelumnya yang mencapai Rp410 juta. Sedangkan penerimaan Bea Keluar yang pada akhir Triwulan I Tahun 2017 mencapai Rp2,83 miliar, mengalami penurunan pada akhir Triwulan I Tahun 2018 menjadi sebesar Rp2,24 miliar. Kecilnya kontribusi Bea Masuk dan Bea Keluar didorong oleh melemahnya harga komoditas internasional.

d) Penerimaan PBB dan Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan pajak lainnya sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2017, ada peningkatan sebesar Rp0,58 miliar. Sumber pendapatan pajak lainnya sampai saat ini belum memberikan kontribusi terlalu signifikan, yaitu hanya 2,24 persen dari seluruh penerimaan perpajakan.

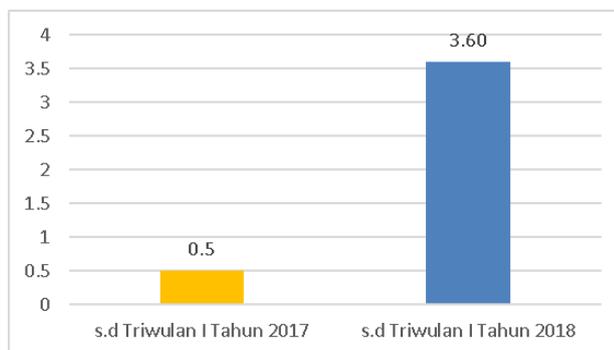
**Grafik II.5 Perbandingan Penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Akumulasi penerimaan PBB akhir Triwulan I Tahun 2018 juga mengalami peningkatan sebesar Rp3,1 miliar dari Triwulan I Tahun 2017. Namun demikian, penerimaan PBB sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2018 hanya berkontribusi 1,12 persen dari seluruh penerimaan perpajakan.

**Grafik II.6 Perbandingan Penerimaan PBB Tahun 2017 dengan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**

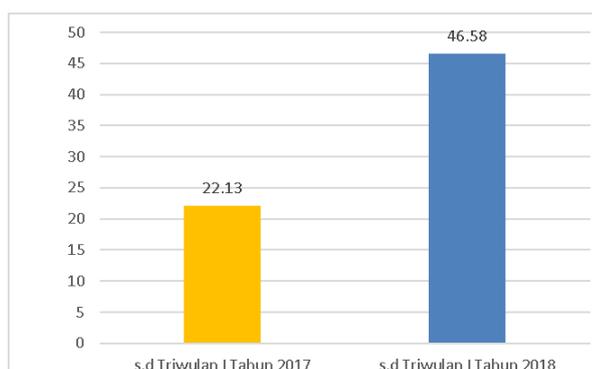


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP di Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 adalah sebesar Rp46,58 miliar (Tabel II.1). Apabila dibandingkan dengan periode akhir Triwulan I Tahun 2017, dimana realisasi PNBP sebesar Rp22,13 miliar, maka terjadi peningkatan sebesar Rp24,45 miliar. Sumbangan terbesar diberikan oleh PNBP Lainnya yang mencapai Rp45,85, sedangkan PNBP BLU sekitar Rp0,73 miliar.

**Grafik II.7 Realisasi PNBP BLU Lingkup Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

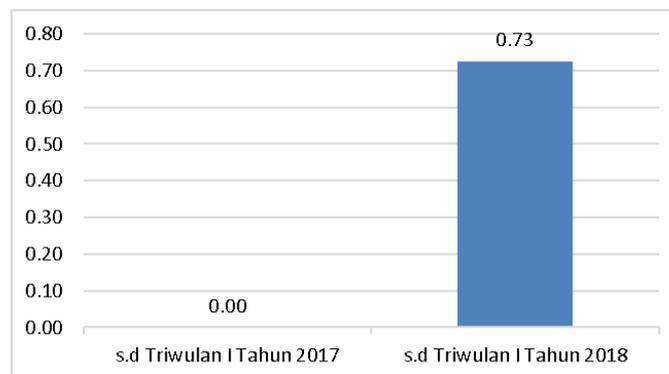
Pemerintah senantiasa berusaha meningkatkan jumlah PNBP dari tahun ke tahun, untuk menopang penerimaan dalam negeri. Hal ini perlu dioptimalkan, karena sampai dengan saat ini PNBP masih kecil kontribusinya dibanding penerimaan perpajakan. Upaya mengoptimalkan kontribusi PNBP terhadap penerimaan negara, diperlukan beberapa langkah strategis, misalnya melakukan penyempurnaan proses bisnis pengelolaan PNBP terutama mekanisme pemungutan, perhitungan, penyetoran dan sanksi dalam pengelolaan PNBP tersebut. Dengan begitu diharapkan PNBP yang dibayarkan oleh para wajib bayar

bisa lebih akurat, transparan dan akuntabel. Hal lain yang juga perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengkaji ulang tarif dari PNBP serta mengoptimalkan pemanfaatan MPN G2 sebagai Sistem Penerimaan Negara.

a) Penerimaan PNBP Badan Layanan Umum

Penerimaan PNBP BLU yang pada akhir Triwulan I tahun 2017 belum ada realisasi, pada Triwulan I tahun 2018 sudah terdapat realisasi yaitu Rp0,73 miliar. Selanjutnya penerimaan PNBP BLU pada Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik II.8 Realisasi PNBP Lainnya Lingkup Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



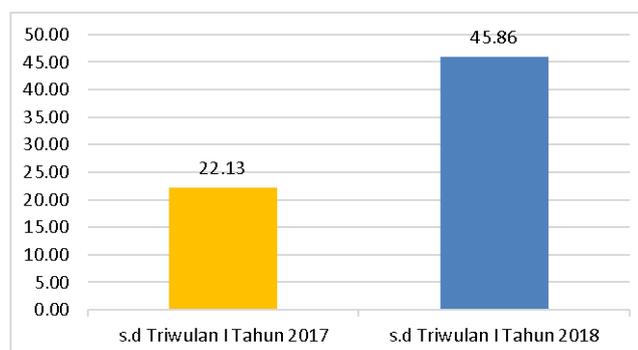
Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Dibandingkan dengan penerimaan PNBP BLU sampai akhir Triwulan I Tahun sebelumnya, penerimaan PNBP BLU sampai akhir Triwulan I Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp0,73 miliar. Meskipun demikian kontribusi Penerimaan PNBP BLU belum signifikan. Hal ini disebabkan karena sampai akhir Triwulan I Tahun 2018 masih banyak SP3B BLU yang belum diajukan sehingga belum ada pengesahan dari KPPN.

b) Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya sampai akhir Triwulan I Tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar Rp45,85 miliar atau 98,44 persen dari seluruh penerimaan PNBP. Realisasi penerimaan PNBP Lainnya Lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik II.9 Realisasi PNBP Lainnya Lingkup Provinsi Bengkulu Tahun 2017 – Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Realisasi PNPB Lainnya untuk periode akhir Triwulan I Tahun 2018 yaitu sebesar Rp45,85 miliar. Jumlah ini meningkat sebesar Rp23,72 miliar dari akhir Triwulan I Tahun 2017 yang mencapai Rp22,13 miliar. Jumlah penerimaan PNPB Lainnya yang signifikan ini terutama terjadi pada Triwulan I Tahun 2018 terutama untuk pendapatan STNK, BPKB kendaraan, penerbitan SIM dan tanda nomor kendaraan bermotor.

3. Pendapatan Hibah

Sampai dengan periode akhir Triwulan I tahun 2018, belum ada realisasi pendapatan hibah di wilayah Bengkulu.

**B. Belanja Negara**

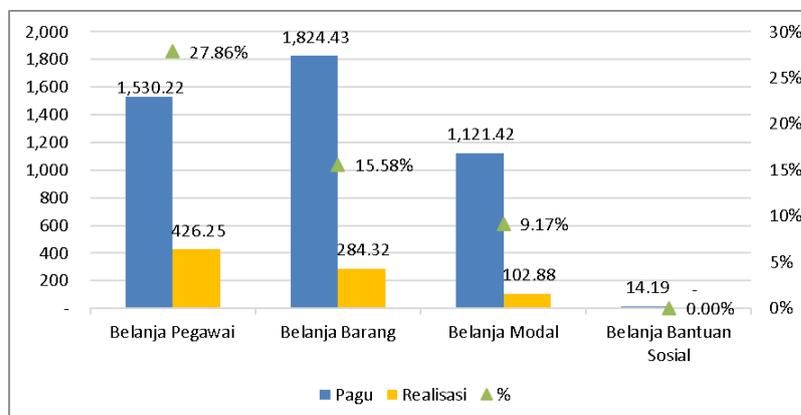
Alokasi belanja negara pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 14,05 triliun. Sebagian besar dari Belanja Negara tersebut yaitu sebesar Rp. 9,56 triliun atau 68,04 persen dari total Belanja Negara berupa alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sedangkan alokasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp4,49 triliun atau sekitar 31,96 persen dari total Belanja Negara. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal di wilayah Provinsi Bengkulu. Melalui desentralisasi fiskal, diharapkan pembangunan di wilayah Provinsi Bengkulu dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan hasilnya segera bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun belanja negara lingkup Provinsi Bengkulu dapat dibagi menjadi kelompok besar yaitu:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Pagu belanja terbesar dialokasikan dalam jenis Belanja Barang sebesar Rp1.824,43 miliar dan Belanja Modal sebesar Rp1.121,42 miliar. Namun demikian, jika dilihat dari tingkat penyerapan Belanja Pegawai memiliki tingkat penyerapan terbesar yaitu 27,86 persen sedangkan tingkat penyerapan jenis belanja Belanja Barang sebesar 15,58 persen dan Belanja Modal sebesar 9,17 persen. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial belum ada realisasi.

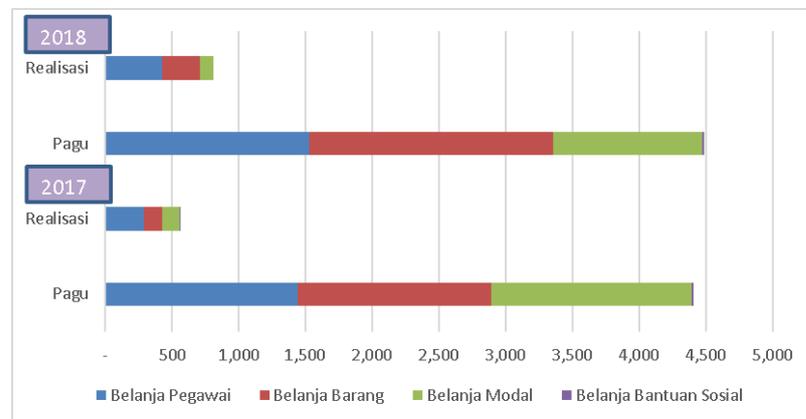
**Grafik II.10 Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Bengkulu s.d Triwulan I Tahun 2018**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Realisasi Belanja Pegawai relatif stabil dalam hal penyerapan karena sifat belanja pegawai yang rutin pencairannya dalam tiap bulan. Sedangkan untuk Belanja Barang mencapai tingkat realisasi di atas target penyerapan Triwulan I yaitu 15 persen. Sedangkan perbandingan realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 dengan sampai dengan Triwulan I tahun 2017, realisasi pada periode sampai dengan Triwulan I tahun 2018 mengalami penurunan karena adanya kebijakan penghematan dari Pemerintah. Sedangkan penyerapan Belanja Modal seperti Triwulan I tahun sebelumnya, masih terkendala beberapa hal antara lain: adanya pejabat/pegawai pengelola keuangan yang mengalami mutasi, keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang/jasa yang bersertifikat.

**Grafik II.11 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I Tahun 2017 dengan Triwulan I Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**

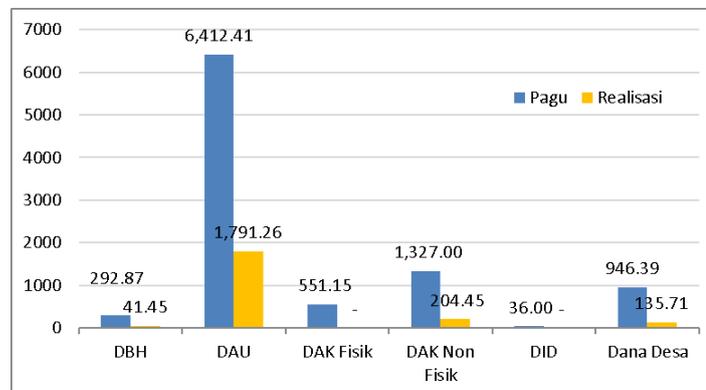


Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

## 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pada tahun 2018 Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dialokasikan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu sebesar Rp9,56 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Rincian realisasi sebagaimana grafik berikut.

**Grafik II.12 Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Akhir Triwulan I Tahun 2018**



Sumber: Simtrada dan SPAN (diolah)

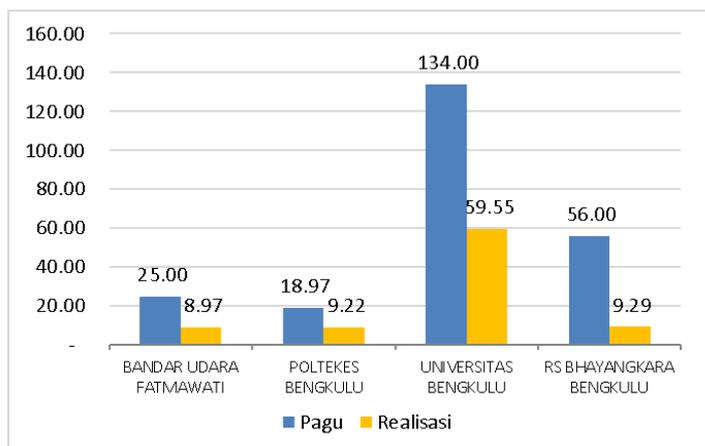
Sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2018, realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp2,17 triliun atau mencapai 22,69 persen. Rincian realisasi adalah DAU sebesar Rp1,79 triliun, DBH sebesar Rp41,45 miliar, DAK Fisik belum ada realisasi, DAK Non Fisik sebesar Rp204,45 miliar, DID belum ada realisasi dan Dana Desa sebesar Rp135,71 miliar.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 belum ada realisasi penyerapan untuk DAK fisik. Secara aturan, pada bulan Februari seharusnya alokasinya sudah bisa mencapai 25 persen. Hal ini dikarenakan masih banyak masalah dan keluhan daerah, baik itu DAK fisik dan DAK non fisik. Masalah tersebut misalnya, persyaratan pencairan DAK dan laporan penyerapan DAK. Penyaluran DAK Fisik tahun anggaran 2018 dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap I sebesar 25 persen dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat Februari, paling lambat Juli. Tahap II sebesar 45 persen dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat April, paling lambat Oktober. Tahap III sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan. Disalurkan paling cepat September dan paling lambat Desember.

### 3. Pengelolaan BLU

Satker yang menerapkan PPK BLU di wilayah Bengkulu ada 4 satker, yaitu Bandar Udara Fatmawati, Universitas Bengkulu, Politeknik Kesehatan Bengkulu dan RS Bhayangkara Bengkulu. Total pagu BLU dari keempat satker tersebut adalah sebesar Rp233,97 miliar. Sedangkan realisasi sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2018 adalah sebesar Rp87,03 miliar. Pagu dan Realisasi Satker BLU sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Grafik II.13 Pagu dan Realisasi Penerimaan PNBPN pada Satker BLU Lingkup Provinsi Bengkulu s.d akhir Triwulan I Tahun 2018 (dalam miliar Rp)**



Sumber: Online Monitoring SPAN (diolah)

Pagu Satker BLU terbesar adalah Universitas Bengkulu yaitu sebesar Rp134 miliar, yang pada akhir Triwulan I tahun 2018 mencapai realisasi sebesar Rp59,55 miliar. Sedangkan RS Bhayangkara Bengkulu mempunyai pagu sebesar Rp56 miliar, mencapai realisasi Rp9,29 miliar. Politeknik Kesehatan Bengkulu mempunyai pagu Rp18,97 miliar, telah mencapai realisasi sebesar Rp9,22 miliar. Bandar Udara Fatmawati Bengkulu melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor

65/KMK/05/2017 tanggal 03 Februari 2017 ditetapkan sebagai satker BLU penuh, pada tahun 2018 memiliki pagu sebesar Rp25 miliar, telah mencapai realisasi Rp8,97 miliar.

#### 4. Manajemen Investasi Pusat

Data Penyaluran KUR sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2018 per Bank/Penyalur lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

**Tabel II.2 Penyaluran KUR per Bank/Penyalar Lingkup Provinsi Bengkulu s.d akhir Triwulan I Tahun 2018 (dalam juta Rp)**

No	Bank/Penyalar	Jumlah Debitur	Nilai Penyaluran
1	Bank Rakyat Indonesia	6,138	138,217.50
2	Bank Mandiri	999	81,823.00
3	Bank Negara Indonesia 1946	55	13,820.00
4	BPD Bengkulu	42	7,990.00
5	BRI Syariah	173	4,044.50
6	CTBC Bank	1	20.93
7	SIKP UMi	74	426.30
Total Penyaluran		7,482	246,342.23

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), data diolah

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2018, KUR yang telah tersalur di Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp246,34 miliar rupiah, yang disalurkan kepada 7.482 debitur. Sebagian besar disalurkan oleh Bank BRI Cabang Bengkulu yang menyalurkan sebesar Rp138,21 miliar kepada 6.138 debitur. KUR yang disalurkan lewat Bank BRI sebagian besar merupakan KUR Mikro. Sedangkan Bank BNI 1946 lebih menasar pada penyaluran KUR Kecil. Penyaluran UMi di Provinsi Bengkulu juga mulai teralisasi yang disalurkan melalui Pegadaian. Realisasi UMi pada akhir Triwulan I Tahun 2018 adalah sebesar Rp426,30 juta yang diberikan kepada 74 debitur.

#### C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan akhir tahun 2018 dalam lingkup Provinsi Bengkulu menggunakan regresi linier dengan mempertimbangkan pola realisasi triwulan sebagaimana tertera dalam tabel II.3 berikut:

**Tabel II.3 Tabel Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan IV Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	2.605,85	367,69	14,11%	2.192,64	84,14%
Belanja Negara	14.056,08	2.986,32	21,25%	14.463,70	102,90%
Surplus/Defisit	(11.450,23)	(2.618,63)		(12.271,06)	

### III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Informasi perkembangan dan analisis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditampilkan berupa data agregat APBD seluruh Pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota), sebagaimana tabel III.1 berikut.

**Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu  
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2016 dan Tahun 2017 (dalam Milyar Rp)**

Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>				
<b>PAD</b>	<b>1.469,42</b>	<b>353,05</b>	<b>1.704,41</b>	<b>380,11</b>
Pajak Daerah	784,71	152,25	867,92	125,79
Retribusi Daerah	58,93	6,60	45,22	6,68
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55,61	0,23	58,13	7,80
Lain-Lain PAD yang Sah	570,18	193,97	733,13	239,84
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>10.442,57</b>	<b>2.168,24</b>	<b>9.820,00</b>	<b>2.187,50</b>
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</i>	9.167,13	2.165,66	8.592,44	2.037,17
Dana Bagi Hasil Pajak	190,33	47,59	184,58	22,44
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	146,06	32,85	108,29	19,01
Dana Alokasi Umum	6.574,26	1.880,83	6.421,42	1.791,26
Dana Alokasi Khusus	2.256,48	204,83	1.878,15	204,45
<i>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</i>	1.035,34	0	946,39	135,71
Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
Dana Penyesuaian (Dana Desa)	1.035,34	0	946,39	135,71
<i>Transfer Pemerintah Provinsi</i>	215,49	2,58	278,05	14,62
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	215,49	2,58	278,05	14,62
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-
<i>Transfer Bantuan Keuangan</i>	24,61	0	3,11	0
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	24,61	0	3,11	0
<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>127,05</b>	<b>31,37</b>	<b>94,95</b>	<b>0,18</b>
Pendapatan Hibah	7,00	0	55,94	0
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	120,05	31,37	39,01	0,18
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>12.039,04</b>	<b>2.552,65</b>	<b>11.619,36</b>	<b>2.567,78</b>
<b>BELANJA</b>				
Belanja Pegawai	4.740,44	855,94	4.928,79	792,95
Belanja Barang	2.613,42	129,58	2.979,60	160,95
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Subsidi	9,62	0,03	-	-
Belanja Hibah	623,26	69,14	424,61	111,58
Belanja Bantuan Sosial	3,50	0,08	7,18	0
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
Belanja Modal	2.883,53	33,58	2.239,64	22,10
Belanja Tidak Terduga	19,40	0	13,83	0
<b>TRANSFER PEMERINTAH DAERAH</b>				
Transfer/Bagi Hasil ke Prov/Kab/Kota/Desa	296,40	0	278,51	14,70
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	296,40	0	278,51	14,70
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan	1.178,62	0	1.197,73	30,67
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda lain	-	-	-	-
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.174,00	0	1.192,47	30,67
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4,62	0	5,26	0
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>12.368,18</b>	<b>1.088,34</b>	<b>12.069,89</b>	<b>1.132,94</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(329,14)</b>	<b>1.464,31</b>	<b>(450,53)</b>	<b>1.434,84</b>

Sumber: Laporan Realisasi APBD (LRA) BKD Prov/Kab/Kota wilayah Provinsi Bengkulu (data diolah)

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, total pagu pendapatan di wilayah provinsi Bengkulu secara agregat mengalami penurunan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, namun total realisasi pendapatannya mengalami kenaikan. Sedangkan untuk jumlah pagu belanja dan transfer juga mengalami penurunan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya namun realisasinya mengalami kenaikan. Tingkat realisasi untuk pendapatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 baru mencapai 22,10 persen atau peningkatan di banding tahun 2017 pada periode yang sama yaitu sebesar 21,20 persen. Sedangkan tingkat realisasi jumlah belanja dan transfer sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 baru mencapai 9,39 persen namun mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 pada periode yang sama yaitu sebesar 8,80 persen.

## A. Pendapatan Daerah

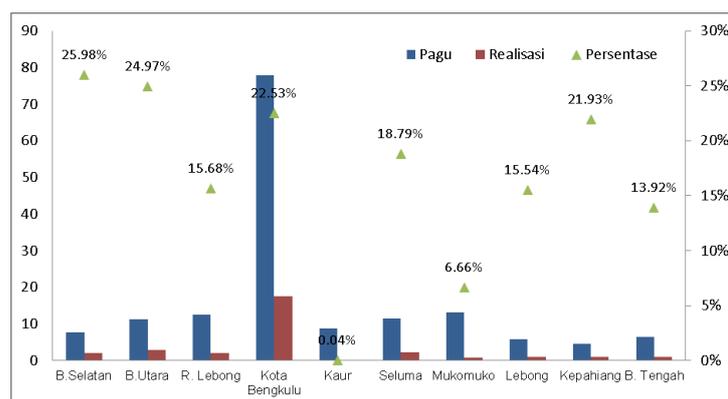
### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 realisasi PAD agregat seluruh Pemda lingkup provinsi Bengkulu mencapai Rp380,11 miliar (22,30 persen dari target). Perbandingan total target PAD dengan total target Pendapatan Daerah masih rendah yaitu dengan rasio hanya sebesar 14,67 persen. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kemandirian Pemda dalam membiayai belanjanya melalui pendapatan asli daerah. Secara umum besaran target PAD di lingkup provinsi Bengkulu masih tergantung pada penerimaan pajak daerah. Rasio target Pajak Daerah dengan total target PAD adalah sebesar 50,92 persen yang berarti lebih dari setengah target PAD merupakan target Pajak Daerah. Sedangkan rasio target Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah dengan total target PAD, adalah sebesar 2,65 persen; 3,41 persen dan 43,01 persen.

#### a) Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik III.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 (dalam Milyar Rp)**



Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov.Bengkulu (data diolah)

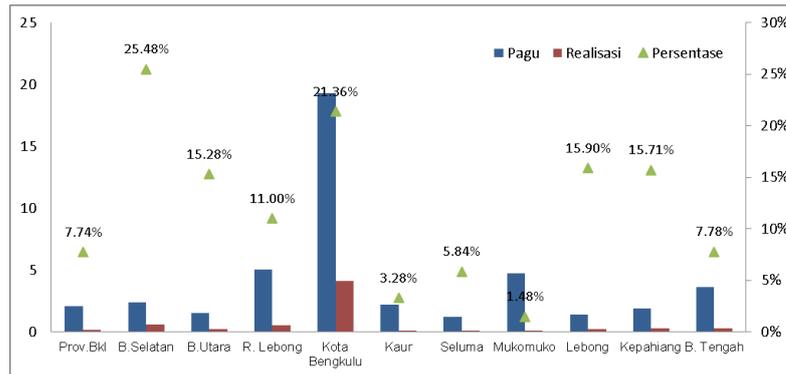
Realisasi Pajak Daerah di lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp125,79 miliar atau mencapai 14,49 persen dari target sebesar Rp867,92 miliar. Untuk Kabupaten lingkup provinsi Bengkulu, persentase realisasi tertinggi untuk Pajak Daerah dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 25,98 persen dari target, dan tingkat realisasi

terendah adalah Kabupaten Kaur sebesar 0,04 persen. Secara nominal penerimaan realisasi pajak terbesar adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp.95,64 miliar dan Pemerintah Kota Bengkulu yaitu sebesar Rp77,85 miliar dimana tingkat realisasi untuk Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar 13,50 persen dan Pemerintah Kota Bengkulu sebesar 22,53 persen.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik III.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2018 (dalam Milyar Rp)**



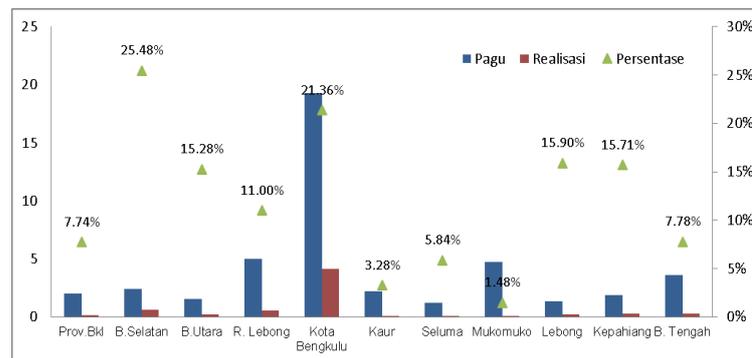
Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov. Bengkulu (data diolah)

Realisasi Retribusi Daerah di lingkup Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp6,68 miliar atau mencapai 14,77 persen dari target retribusi daerah sebesar Rp45,22 miliar. Tingkat realisasi retribusi daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 25,48 persen, sedangkan realisasi terendah dicatatkan oleh Kabupaten Mukomuko sebesar 1,48 persen.

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan lingkup Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

**Grafik III.3 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2018 (dalam Milyar Rp)**



Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov. Bengkulu (data diolah)

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sudah terealisasi sebesar Rp7,80 miliar atau sudah mencapai 13,43 persen dari target. Tingkat realisasi tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lebong sebesar 76,11 persen, sedangkan yang masih belum ada realisasi adalah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur,

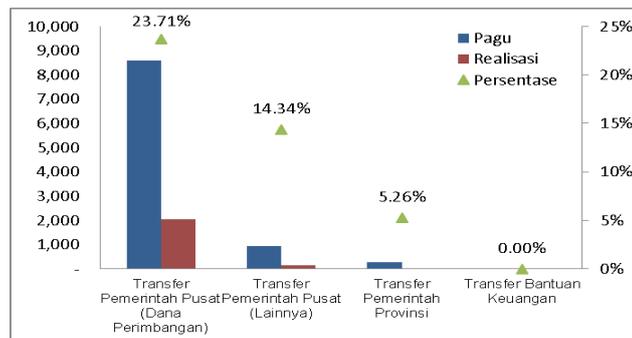
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan pemerintah daerah yang tidak memiliki target untuk jenis penerimaan ini adalah Kabupaten Bengkulu Utara. Penerimaan dalam kelompok pendapatan ini adalah Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Pencapaian realisasi atas target PAD secara agregat dari seluruh Pemda lingkup provinsi Bengkulu tanpa Lain-lain PAD Yang Sah sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 yaitu 14,44 persen menurun dibanding capaian realisasi PAD pada periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu 17,69 persen. Secara umum hampir seluruh Pemda lingkup provinsi Bengkulu mengalami penurunan tingkat realisasi target PAD dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

## 2. Pendapatan Transfer

Perkembangan pagu dan realisasi untuk masing-masing dana transfer sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebagaimana grafik III.4 berikut ini:

**Grafik III.4 Total Realisasi Transfer Dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Bengkulu Triwulan I Tahun 2018 (dalam Milyar Rp)**



Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov.Bengkulu (data diolah)

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, total pagu pendapatan transfer adalah sebesar Rp.9.820,00 miliar dengan total realisasi sebesar Rp2.187,50 miliar (22,28 persen). Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) yang terdiri dari DBH Pajak/DBH SDA, DAU dan DAK masih merupakan pendapatan transfer terbesar yang diterima oleh pemerintah daerah di tahun 2018 dengan rasio sebesar 73,95 persen dari total pendapatan transfer. Sedangkan Transfer Pemerintah Lainnya (Dana Desa) sebesar 9,64 persen dari total pendapatan transfer. Pendapatan Transfer di wilayah provinsi Bengkulu secara agregat turun dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun tingkat realisasi mengalami peningkatan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

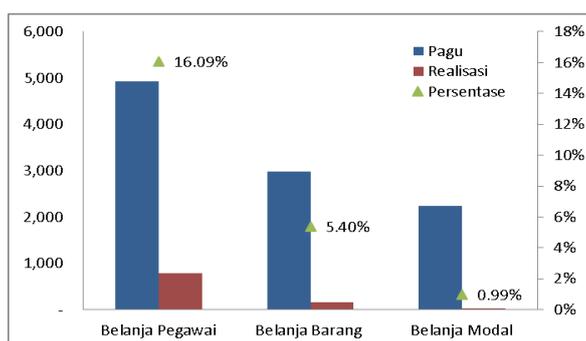
Termasuk dalam kelompok pendapatan ini adalah pendapatan Hibah dan pendapatan lainnya termasuk Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima oleh pemda. Berdasarkan data realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, realisasi penerimaan kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari pendapatan lain-lain yaitu sebesar Rp0,18 miliar. Sedangkan Hibah dan DID belum ada realisasinya. Terdapat 3 (tiga) pemerintah daerah yang memiliki pagu Hibah yaitu Kab.Rejang Lebong, Kab.Kepahiang dan Kota Bengkulu dengan total

sebesar Rp55,94 miliar. Sedangkan 2 (dua) pemerintah daerah menerima DID untuk tahun 2018 yaitu Kab.Lebong (Rp26,75 miliar) dan Kabupaten Kaur (Rp9,25 miliar) dengan total sebesar Rp36,00 miliar.

## B. Belanja Daerah

Total pagu belanja daerah tahun 2018 turun sebesar 2,75 persen dibanding pagu belanja tahun sebelumnya. Penurunan pagu belanja khususnya dikarenakan alokasi belanja modal yang berkurang cukup signifikan sebesar Rp643,89 miliar (22,33 persen).

**Grafik III.5 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Milyar Rp)**



Sumber: LRA APBD Pemda lingkup Prov.Bengkulu (data diolah)

Pagu anggaran belanja pegawai merupakan pagu belanja dengan tingkat rasio terbesar yaitu sebesar 40,84 persen dibanding total jumlah pagu belanja dan transfer secara keseluruhan. Adapun tingkat realisasi belanja pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 adalah 16,09 persen (Rp792,95 miliar) dari pagu anggarannya (Rp4.928,79 miliar). Sementara itu, belanja modal masih sangat rendah tingkat realisasinya yaitu baru mencapai 0,99 persen yang dikarenakan beberapa pemda masih belum ada realisasi atau tingkat penyerapan yang rendah untuk belanja modal tanah, gedung dan bangunan.

## C. Prognosis Realisasi APBD

Perkiraan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah sampai dengan akhir tahun 2018 dalam lingkup Provinsi Bengkulu menggunakan regresi linier dengan mempertimbangkan pola realisasi triwulan sebagai berikut:

**Tabel III.2 Tabel Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan IV Tahun 2018**

(dalam miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	11.619,36	2.567,78	22,10%	11.814,42	101,68%
Belanja Daerah	12.069,89	1.132,94	9,39%	11.027,46	91,36%
Surplus/Defisit	(450,53)				

#### IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

##### A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam suatu periode. LKPK sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebagaimana tertera dalam tabel IV.1 berikut.

**Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Milyar Rupiah)**

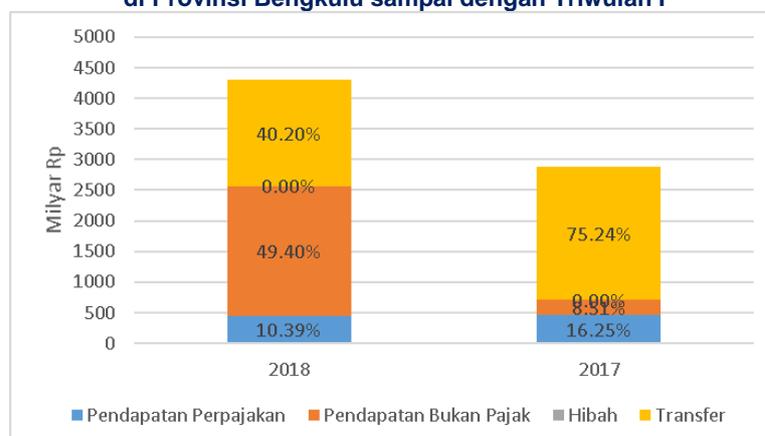
Uraian	2018			2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Konsolidasi
Pendapatan Negara	3.047,12	2.132,63	2.568,89	711,40
Pendapatan Perpajakan	320,76	125,79	446,55	467,03
Pendapatan Bukan Pajak	2.726,36	279,66	2.122,34	244,37
Hibah	-	-	-	-
Transfer	-	1.727,21 <sup>1)</sup>	1.727,21 <sup>1)</sup>	2.161,78 <sup>1)</sup>
Belanja Negara	3.192,63	1.118,24	1.699,99	1.639,05
Belanja Pemerintah	581,74	1.087,58	1.669,32	1.639,05
Transfer	2.610,89	30,67	30,67	-
Surplus/(Defisit)	(145,51)	1.014,41	3.479,79	(927,65)
Pembiayaan	-	(12,35)	(12,35)	-
Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	12,35	12,35	-
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	(145,51)	1.002,06	856,55	(927,65)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Prov.Bengkulu

##### B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

Pendapatan konsolidasi tingkat wilayah adalah konsolidasian antara seluruh pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal.

**Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan I**

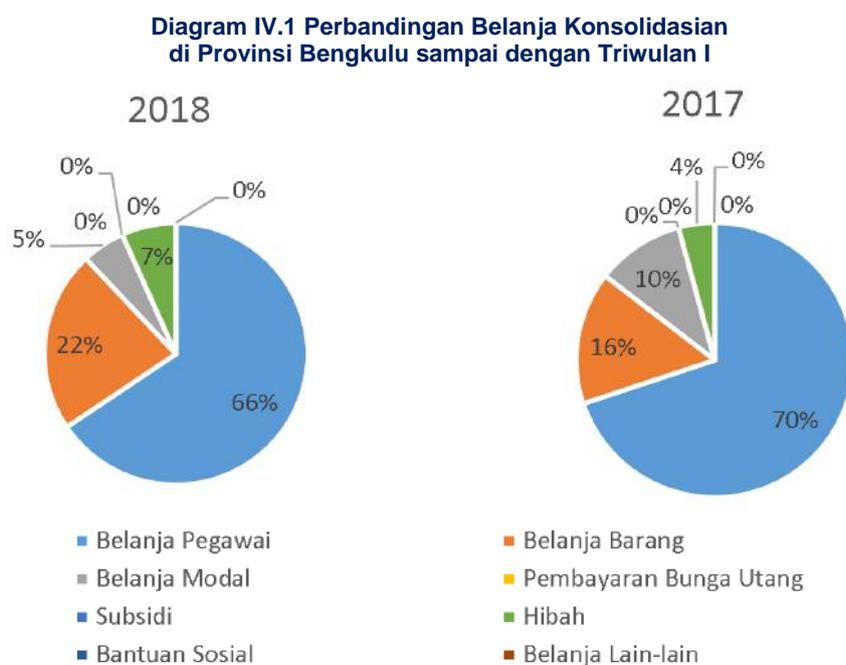


Sumber: LRA Pemerintah Konsolidasian Tk. Wilayah Prov.Bengkulu

Pendapatan negara Triwulan I Tahun 2018 secara total mengalami penurunan dibandingkan periode Triwulan I Tahun 2017. Peningkatan terutama disebabkan pendapatan yang berasal dari hibah dan penerimaan negara bukan pajak. Porsi pendapatan negara bukan pajak pada Triwulan I Tahun 2018 sebagaimana tertera pada Grafik IV.1 sekaligus merupakan pos yang mendominasi pendapatan negara hingga mencapai lebih dari 49 persen. Jika dibandingkan dengan periode Triwulan I Tahun 2017, hal ini mengindikasikan adanya pengurangan porsi pendapatan transfer dalam upaya meningkatkan kemandirian Pemda. Disisi lain, perlu dicermati penurunan pendapatan perpajakan secara total (konsolidasi) dengan terus mengali sumber-sumber perpajakan pusat maupun daerah.

### C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja konsolidasi tingkat wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi).



Sumber: LRA Pemerintah Konsolidasian Tk. Wilayah Prov. Bengkulu

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, porsi belanja pemerintah daerah lebih besar dari pemerintah pusat. Belanja pegawai merupakan belanja dengan porsi terbesar yang mencapai 73 persen untuk belanja pemerintah daerah dan 52 persen untuk belanja pemerintah pusat. Sedangkan porsi belanja modal relatif kecil yaitu 2 persen untuk belanja pemerintah daerah dan 11 persen untuk belanja pemerintah pusat. Prioritas belanja yang masih dipergunakan untuk *mandatory spending* (belanja pegawai dan belanja barang) perlu diupayakan kepada belanja yang memberikan manfaat jangka panjang dan dapat memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

#### **D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)**

PDRB merupakan penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Analisis kontribusi pemerintah dalam perekonomian berdasarkan data Laporan Operasional (*Statement of Government Operations*).

Kontribusi pemerintah terhadap PDRB terutama diukur dari besaran belanja pemerintah (G) dan investasi (I). Nilai belanja pemerintah diproxikan dari nilai pengeluaran konsumsi pemerintah yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga dikurangi penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai investasi diproxikan dari nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap.

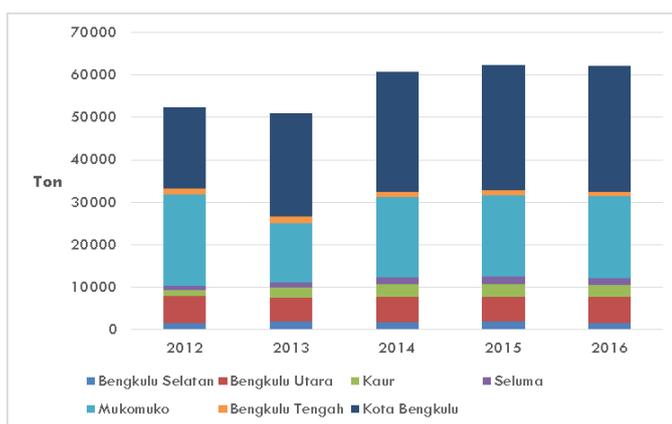
Berdasarkan laporan operasional, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDRB sebesar 9,18 persen sedangkan kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB sebesar 0,55 persen. Dengan demikian kontribusi belanja pemerintah memegang peran yang sangat besar. Hal tersebut dicerminkan dari besarnya kompensasi pegawai yang mencapai Rp 1,09 triliun atau 74 persen dari total besaran belanja pemerintah (G). Sebaliknya investasi, memberi kontribusi yang relatif kecil terhadap perekonomian. Dalam jangka pendek hal ini memberikan dampak positif bagi peningkatan output ekonomi. Namun dalam jangka panjang peran investasi sangat perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan secara inklusif. Dalam konteks peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor pendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bengkulu, kontribusi belanja pemerintah perlu diupayakan menurun sejalan dengan peningkatan kontribusi investasi. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan penciptaan investasi masuk ke Provinsi Bengkulu harus terus diupayakan.

## V. BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

### Pembangunan Ekonomi Kemaritiman Bengkulu

Pembangunan kemaritiman menjadi *issue* yang penting. Wilayah perairan/laut merupakan bagian terbesar dari total wilayah Indonesia (sekitar dua per tiga), menjadikan pembangunan kelautan, atau pembangunan maritim memiliki peranan yang sangat penting. Dalam *scope* regional, Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumber wilayah pesisir yang cukup besar, baik potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, perhubungan dan maupun potensi energi serta sumberdaya mineral. Hal ini dikarenakan letak geografis Provinsi Bengkulu yang berada di bagian pantai barat pulau sumatera dan berhadapan langsung dengan samudera hindia, dengan garis pantai sepanjang ±525 km yang memanjang dari tenggara. Luas laut territorial Provinsi Bengkulu sampai batas 12 mil adalah 11.667,6 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1.166.760 hektar dan apabila dihitung sampai batas perairan laut ZEEI (Zona EKonomi Eksklusif Indonesia), maka luas perairan laut Provinsi Bengkulu mencapai 194.460 km<sup>2</sup> yang setara dengan 19.446.000 hektar.

**Grafik VI.1 Perkembangan Volume Produksi Perikanan Menurut Kategori Besarnya Usaha (Perikanan Laut)**



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

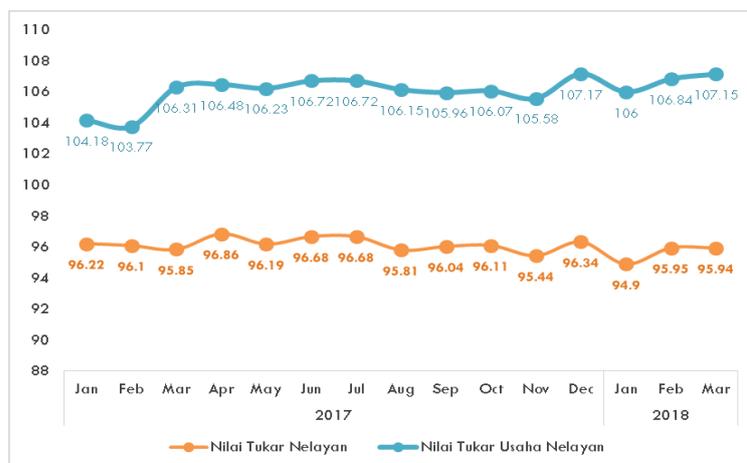
Statistik menunjukkan bahwa luasan laut sebanding dengan jumlah produksi perikanan khususnya perikanan laut yang berasal dari perikanan tangkap. Total volume produksi perikanan menurut kategori besarnya usaha yang dihasilkan sampai dengan tahun 2016 meningkat sebesar 62.213,90 Ton (16,34 persen dibandingkan tahun 2012). Kota Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko merupakan wilayah penghasil tangkapan ikan terbesar dari tahun ke tahun. Volume produksi perikanan laut di Kota Bengkulu pada tahun 2016 mencapai 29.676,80 Ton (*share* mencapai 47,70 persen), sedangkan di Kabupaten Mukomuko mencapai 19.195,60 Ton (*share* mencapai 30,85 persen). Total rumah tangga nelayan yang terlibat dalam usaha perikanan pada tahun 2016 adalah 7.583 rumah tangga dengan jumlah nelayan yang ada mencapai 21.097 orang. Dari jumlah nelayan tersebut 91 persen merupakan nelayan penuh (*full fishermen*) sedangkan sisanya adalah nelayan sambilan utama dan sambilan tambahan.

Potensi dan prospek kelautan dan perikanan yang besar tersebut mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu. Pembangunan kemaritiman dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 – 2021. Sejak tahun 2016, strategi dan kebijakan

pembangunan telah dicanangkan mengarah pada Bengkulu sebagai poros maritim Indonesia. Kebijakan diarahkan untuk memanfaatkan semua potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada guna meningkatkan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap pembangunan daerah, pendapatan asli daerah, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir. Namun, kondisi yang ada menunjukkan bahwa potensi kemaritiman Provinsi Bengkulu belum dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Belum optimalnya peran sektor kemaritiman di provinsi Bengkulu ditengarai oleh beberapa faktor diantaranya potensi dan kekuatan ekonomi kemaritiman belum terdata dan terkonsolidasi dengan baik serta keterbatasan kapasitas daerah termasuk kelengkapan regulasi dalam memperkuat pengelolaan kemaritiman berdasarkan potensi lokal (Bappeda Provinsi Bengkulu, 2017).

Pengelolaan sektor kemaritiman khususnya pada sektor perikanan yang belum optimal tersebut berimplikasi pada tingkat kesejahteraan nelayan. Perkembangan tingkat kesejahteraan nelayan yang tercermin dari besaran indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Subsektor Perikanan yang diproyeksikan dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada pada di bawah 100. Hal ini berarti kemampuan nelayan dalam memenuhi seluruh pengeluaran rumah tangga termasuk biaya produksi, sekolah, berobat, membeli sandang, papan dan lainnya secara umum dapat dikatakan masih relatif rendah. Bahkan pada bulan Januari 2018, besaran NTP adalah yang terendah (94,9).

**Grafik VI.2 Perkembangan Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Usaha Nelayan**



Sumber: BPS Provinsi Bengkulu

Di sisi lain, usaha perikanan sangat menjanjikan. Pengeluaran riil dari usaha perikanan sebagaimana ditunjukkan dengan besaran Nilai Tukar Usaha Nelayan (NTUN), selalu surplus. Rasio indeks harga yang diterima nelayan dari usaha perikanan dengan indeks harga yang dibayarkan nelayan untuk pengeluaran usaha perikanan berada di atas 100. Dari perkembangan besaran kedua indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perikanan di Provinsi Bengkulu masih belum optimal dalam menjamin tingkat kesejahteraan nelayan.

Kurang optimalnya pengelolaan perikanan tersebut telah diidentifikasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dan menjadi isu strategis sebagai acuan dalam menentukan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinas Kelautan selaku OPD yang menjadi *leading sector* dalam hal ini, mentransformasikan kedalam

program/kegiatan tahunan sebagaimana tertera dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2018. Pagu indikatif Dinas Kelautan Perikanan tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp21,73 Milyar tentunya tidak dapat menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan dari program/kegiatan dalam menuntaskan pembangunan ekonomi permasalahan ini. Prioritas kegiatan disesuaikan dengan urgensi dan kapasitas daerah (kondisi anggaran daerah) yang ada.

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu, pembangunan sektor industri pengolahan hasil perikanan merupakan salah satu prioritas penting. Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan identik dengan pemanfaatan teknologi dan investasi. Usaha Pengolahan Ikan (UPI) baik skala besar maupun skala kecil yang ada perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan. Beberapa pengembangan sektor industri pengolahan yang sangat diperlukan sebagaimana tertera pada tabel berikut:

**Tabel VI.1 Matriks Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Sektor Industri Pengolahan Hasil Perikanan**

Kegiatan	Lokasi
<b>Program : Pengembangan/peningkatan industri pengolahan hasil perikanan</b>	
Pengembangan industri pengolahan gurita	Kab. Kaur
Pengembangan/peningkatan industri ikan asin di Pulau Enggano	Kab.Bengkulu Utara
Pengembangan/peningkatan industri ikan ikan keladi	Kab.Mukomuko
Pengembangan industri pengolahan rumput laut	Kab.Kaur
Pengembangan industri pengolahan ikan rucah/ikan hasil tangkapan sampingan	7 kab./kota
Pengembangan industri tepung ikan untuk bahan baku pakan ternak dan pellet	Kab.Mukomuko, Kab.Kaur dan Kota Bengkulu
Pembangunan sentra industri perikanan tuna	Kab.Kaur
Pengembangan industri penggilingan daging ikan dan ikan finlet	7 kab./kota
<b>Program : Pengembangan/pengadaan fasilitas pendukung industri pengolahan hasil perikanan</b>	
Pembangunan pabrik pengolahan tepung ikan (skala kecil)	Kab.Mukomuko, Kab.Kaur dan Kota Bengkulu
Pengadaan bantuan peralatan industri pengolahan hasil perikanan skala kecil	Kab.Kaur
Pembangunan pabrik pengalengan ikan (mulai dari persiapan sampai pembangunan fasilitas fisik)	Kota Bengkulu

Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu (diolah)

Industri pengolahan hasil perikanan akan mentransformasikan bahan-bahan hasil perikanan sebagai input menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi lebih tinggi. Industri perikanan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja dan terutama pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Oleh karena pentingnya industri pengolahan tersebut, perlu terobosan untuk mengatasi *constraint* kapasitas daerah melalui investasi sektor privat dalam melakukan pengelolaan beberapa komoditas perikanan potensial (seperti gurita, rumput laut, tuna dan ikan rucah).